Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 31166-31175

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan tiroang kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Firmansyah[1], Muhammad Rais R[2], Herman D[3]
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Corresponding Author Firmansyah, E-Mail: firmansyahlgt123@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the current state of governance in Tiroang Village and to identify and analyze various factors that influence the effectiveness and efficiency of governance at the village level, particularly in Tiroang Village, Tiroang Subdistrict, Pinrang Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consist of the Village Head, Village Secretary, Administrative Staff, Community Empowerment Institutions, and Community Leaders. Data analysis was performed using the Nvivo application. The results of the study show that government administration in Tiroang Village has basically shown a positive direction with a clear organizational structure between the village head, secretary, and administrative staff, relatively good coordination with the subdistrict, LPM, and the community, as well as the provision of public services oriented towards ease of access. However, the results also show that the effectiveness of governance still faces obstacles, such as a limited number of officials, inadequate infrastructure, and uneven levels of community participation, meaning that residents' aspirations are not fully accommodated in decision-making. This condition reflects that although the principle of good governance has begun to be implemented, its application still requires further strengthening. Meanwhile, the effectiveness and efficiency of governance in Tiroang Village is influenced by coordination with higher levels of government, the level of community participation, the competence and division of tasks among officials, and the availability of infrastructure, including information technology. To improve performance, it is necessary to strengthen coordination, increase community participation, develop the capacity of officials, and maintain and optimize supporting facilities so that public services can be more adaptive, transparent, and responsive.

Keywords: Governance, Government, Village

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di era modern menghadapi tuntutan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah tidak lagi dapat memposisikan diri sebagai satu-satunya aktor dalam mengatur kehidupan masyarakat, tetapi harus berkolaborasi dengan sektor swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam konteks inilah muncul konsep governance atau tata kelola pemerintahan yang menekankan partisipasi, kolaborasi, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan publik. Governance menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif, efisien, dan diterima oleh masyarakat luas.

Di Indonesia, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan agenda strategis dalam reformasi birokrasi. Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, di tingkat lokal, khususnya pada satuan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan prinsip good governance sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, hingga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori tata kelola yang ideal dengan realitas birokrasi yang masih konvensional dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pentingnya penelitian mengenai tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan terletak pada posisinya sebagai ujung tombak pelayanan publik. Kelurahan menjadi lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kinerja aparatur dan efektivitas sistem birokrasi di tingkat ini akan sangat menentukan persepsi publik terhadap kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Dalam kerangka desentralisasi, kelurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, upaya untuk memahami bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan di tingkat kelurahan menjadi krusial dalam menilai sejauh mana prinsip good governance diterapkan secara nyata di lapangan.

Secara empiris, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan integrasi teknologi informasi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti e-government dan digital governance untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi, namun implementasinya di daerah belum sepenuhnya optimal. Data dari E-Government Development Index (EGDI) menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Hal ini menandakan perlunya strategi yang lebih kontekstual dan berbasis bukti dalam mengembangkan sistem tata kelola di tingkat lokal, termasuk di kelurahan.

Selain faktor struktural, aspek kultural juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Budaya birokrasi yang hierarkis dan paternalistik sering kali menghambat inovasi dan inisiatif aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan kurangnya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Akibatnya, akuntabilitas publik melemah dan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga terlihat di berbagai wilayah, termasuk Kelurahan Tiroang, yang menjadi fokus penelitian ini, di mana masih ditemukan keterbatasan dalam partisipasi warga dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik.

Kelurahan Tiroang di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu contoh nyata dinamika tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Sebagai wilayah administratif yang cukup strategis, kelurahan ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Namun, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya aparatur, sarana prasarana yang belum maksimal, serta keterlibatan masyarakat yang belum merata. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya dalam memberikan pelayanan publik.

Dari sisi konseptual, penelitian ini menggunakan kerangka teori good governance, new public management, dan collaborative governance untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Good governance menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; new public management menggarisbawahi efisiensi dan kinerja aparatur melalui pendekatan manajerial; sedangkan collaborative governance menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan publik. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dapat dijalankan secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memberikan sumbangan terhadap pengembangan model tata kelola yang lebih partisipatif dan berbasis digital, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pemerintahan yang modern dan transparan. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kapasitas aparatur, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang" ini menjadi penting sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam tata kelola pemerintahan lokal. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif yang berbasis pada observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian

ini akan menyajikan potret empiris penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang sekaligus menawarkan solusi aplikatif untuk memperbaiki sistem tata kelola di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah karya ilmiah karena menentukan keabsahan, arah, serta kedalaman hasil penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian berjudul "Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang", pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami makna, perilaku, serta dinamika sosial di balik proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Penelitian kualitatif menekankan pada upaya menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang informan tanpa manipulasi data. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menafsirkan realitas sosial secara empiris dan kontekstual sesuai kondisi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada penggambaran fenomena secara sistematis dan bermakna sesuai pengalaman sosial yang terjadi di Kelurahan Tiroang.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang dipilih secara purposive atau sengaja karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan birokrasi yang relevan dengan isu penelitian. Kelurahan Tiroang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dengan dinamika masyarakat yang heterogen serta tingkat partisipasi warga yang bervariasi. Kondisi ini memungkinkan peneliti menggali berbagai aspek penting dari tata kelola pemerintahan seperti transparansi, partisipasi publik, koordinasi antarlembaga, serta efisiensi pelayanan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu antara Agustus hingga September 2025, dengan tahapan mencakup observasi awal, wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo. Pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap realitas tata kelola pemerintahan lokal di daerah yang sedang beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi dan prinsip good governance.

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama yang menjadi inti penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang. Pertama, menggambarkan kondisi aktual tata kelola pemerintahan, yang mencakup peran aparatur, mekanisme pelayanan publik, serta pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi tata kelola, baik dari sisi kelembagaan, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi informasi. Ketiga, menelaah strategi dan kebijakan pemerintah kelurahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal. Fokus ini menjadi pedoman utama dalam proses pengumpulan dan analisis data agar hasil penelitian tetap relevan dan terarah.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui informan kunci (key informants) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informan yang dipilih harus memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang. Adapun informan utama terdiri atas: Lurah sebagai pimpinan kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Staf Administrasi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, serta perwakilan warga yang aktif dalam kegiatan pemerintahan. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, sebab pengambilan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh (data saturation), yakni kondisi di mana informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru. Pendekatan ini penting agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris yang faktual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif di lingkungan kantor kelurahan untuk mengamati perilaku, proses kerja, serta interaksi antara aparat dan masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung tanpa melalui perantara verbal. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur agar informan dapat mengemukakan pandangan serta pengalaman mereka secara terbuka. Pertanyaan difokuskan pada aspek tata kelola, efektivitas pelayanan publik, serta hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip, laporan kegiatan, struktur organisasi, dan foto-foto kegiatan pemerintahan. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan digunakan dalam kerangka triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang relevan dikategorikan ke dalam tema-tema seperti transparansi, partisipasi, dan efektivitas pelayanan publik. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, dan visualisasi hasil coding menggunakan aplikasi NVivo 14, yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses reflektif dan diverifikasi kembali kepada informan melalui mekanisme member checking agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini mengacu pada empat kriteria validitas menurut Lincoln dan Guba (1985), yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Credibility dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta verifikasi hasil temuan dengan para informan. Transferability dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci mengenai karakteristik sosial dan birokrasi di Kelurahan Tiroang, sehingga pembaca dapat menilai kesesuaian temuan dengan konteks lain. Dependability dilakukan dengan mencatat seluruh prosedur penelitian secara sistematis agar dapat direplikasi oleh peneliti lain, sedangkan confirmability dijaga melalui pencatatan reflektif dan penggunaan data empiris sebagai dasar interpretasi. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian berjalan secara objektif, transparan, dan ilmiah.

Selain menjaga validitas, penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada informan dan meminta persetujuan (informed consent). Seluruh informasi pribadi dan identitas informan dijaga kerahasiaannya. Peneliti juga berkomitmen untuk menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, serta menjaga netralitas dalam setiap proses interaksi di lapangan. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pihak mana pun. Penerapan etika ini menjadi bagian dari tanggung jawab ilmiah untuk memastikan integritas penelitian tetap terjaga.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tata kelola pemerintahan di Kelurahan Tiroang dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Melalui analisis mendalam berbasis data lapangan dan penggunaan teknologi analisis NVivo, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih partisipatif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan secara empiris kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat

disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kelurahan Tiroang sudah menunjukkan perkembangan positif menuju penerapan prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Pemerintah kelurahan telah berupaya meningkatkan pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjalankan administrasi secara lebih transparan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi masih menjadi kendala utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Kelurahan Tiroang terdiri atas Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan, serta Staf Administrasi Umum. Berdasarkan observasi, pembagian tugas telah berjalan sesuai dengan struktur formal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, masih terdapat tumpang tindih pekerjaan akibat kurangnya tenaga administratif dan lemahnya sistem koordinasi internal. Beberapa kegiatan seperti pengelolaan data kependudukan dan pelayanan administrasi surat masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat. Lurah Tiroang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, pemerintah kelurahan telah berupaya membuka akses informasi publik melalui papan pengumuman, rapat rutin, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam forum musyawarah. Namun, sebagian besar warga mengaku masih belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan keuangan dan perencanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LPM, diketahui bahwa masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, bukan pada proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik partisipatif belum berjalan optimal, meskipun secara normatif prinsip keterbukaan sudah diakui dan diimplementasikan sebagian.

Dari aspek pelayanan publik, Kelurahan Tiroang telah melaksanakan berbagai layanan administratif seperti pembuatan surat keterangan domisili, usaha, dan pengantar dokumen kependudukan. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata waktu pelayanan berkisar antara 15–30 menit untuk satu jenis layanan sederhana. Walaupun cepat, proses pelayanan masih tergantung pada kehadiran aparat tertentu, dan belum semua staf memiliki kemampuan digital untuk mengoperasikan sistem berbasis komputer. Masyarakat mengapresiasi keramahan aparatur kelurahan, namun berharap adanya sistem pelayanan berbasis daring agar lebih efisien dan tidak bergantung pada jam kerja kantor.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan juga menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, partisipasi warga dalam kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, musrenbang, dan gotong royong cukup tinggi. Namun, pada kegiatan yang bersifat perencanaan anggaran dan evaluasi program, partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, serta persepsi masyarakat bahwa kebijakan kelurahan sudah ditentukan sebelumnya. Padahal, prinsip good governance menekankan pentingnya partisipasi aktif warga sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap aspek tata kelola pemerintahan menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum mencapai tahap optimal. Tantangan terbesar terletak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Secara umum, masyarakat menilai pelayanan publik di Kelurahan Tiroang cukup responsif dan mudah diakses, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan dan sistem monitoring yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi good governance di Kelurahan Tiroang baru mencapai tahap transisional. Artinya, pemerintah kelurahan sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem kerja yang modern dan berbasis digital. Lurah Tiroang menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat pelayanan publik dengan pendekatan kolaboratif bersama masyarakat dan LPM. Namun, untuk mencapai tata kelola yang ideal, diperlukan dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah daerah, terutama dalam aspek pelatihan aparatur dan modernisasi sistem administrasi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang telah mengarah pada prinsip good governance, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks teori governance, sebagaimana dijelaskan oleh UNDP (1997), tata kelola yang baik mencakup tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketiga prinsip ini telah terlihat di Kelurahan Tiroang, namun masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek substansial seperti keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan atau penggunaan teknologi untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Secara struktural, birokrasi Kelurahan Tiroang telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku, tetapi masih menunjukkan karakteristik birokrasi tradisional yang hierarkis. Dalam perspektif New Public Management (NPM), birokrasi modern seharusnya berorientasi pada kinerja dan pelayanan, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur. Temuan lapangan menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik sudah mulai berubah ke arah efisiensi dan kepuasan masyarakat, namun belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas manajerial aparatur. Penggunaan teknologi digital masih terbatas, sehingga proses pelayanan cenderung lambat dan manual.

Dari sisi partisipasi publik, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah berjalan setiap tahun, namun keterlibatan masyarakat masih bersifat simbolik. Berdasarkan teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama. Di Kelurahan Tiroang, partisipasi warga masih lebih banyak pada kegiatan fisik seperti kerja bakti daripada dalam proses perencanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan warga masih bersifat instruktif, bukan partisipatif sejati.

Transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Tiroang juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi publik. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat hanya memperoleh informasi melalui papan pengumuman dan pertemuan terbatas. Padahal, prinsip transparency in governance mengharuskan adanya keterbukaan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kelurahan perlu memanfaatkan media digital, seperti situs web atau aplikasi layanan publik, agar proses administrasi dan pelaporan kegiatan dapat diakses secara terbuka dan efisien.

Efisiensi birokrasi merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan. Dalam teori administrasi publik modern, efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk mengoptimalkan sumber daya. Pemerintah Kelurahan Tiroang telah menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat, tetapi masih bergantung pada individu tertentu. Ketiadaan sistem kerja berbasis standard operating procedure (SOP) digital menyebabkan pelayanan terhambat saat staf tertentu tidak hadir. Penerapan e-government dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat konsistensi pelayanan publik.

Dari sisi budaya organisasi, ditemukan bahwa sebagian aparatur masih memiliki pola pikir administratif yang kaku. Inovasi pelayanan belum berkembang karena belum adanya dorongan untuk berkreasi dan memperbaiki sistem kerja. Menurut teori organizational culture dari Schein (2010), perubahan kinerja organisasi harus dimulai dari perubahan nilai dan sikap individu dalam organisasi. Oleh karena itu, pelatihan kompetensi aparatur perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan etos pelayanan dan tanggung jawab publik.

Hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang mulai meningkat. Warga menilai aparatur kelurahan cukup terbuka dan ramah dalam melayani kebutuhan publik. Namun, masih ada jarak dalam hal komunikasi kebijakan dan pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi program. Dalam konteks teori public accountability, kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah daerah) sudah berjalan baik, tetapi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kelurahan Tiroang berada pada fase transisi menuju pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis digital. Pemerintah kelurahan telah berupaya menerapkan prinsip good governance, namun masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan daerah yang mendorong modernisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan literasi digital

masyarakat, serta perbaikan sistem komunikasi publik menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang pada dasarnya telah menunjukkan arah yang positif dengan adanya struktur organisasi yang jelas antara lurah, sekretaris, dan staf administrasi, koordinasi yang relatif baik dengan kecamatan, LPM, serta masyarakat, serta penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah aparatur, sarana prasarana yang belum memadai, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun prinsip good governance mulai diupayakan, penerapannya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tiroang dipengaruhi oleh koordinasi dengan pemerintah atasan, tingkat partisipasi masyarakat, kompetensi serta pembagian tugas aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana termasuk teknologi informasi. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi warga, pengembangan kapasitas aparatur, serta pemeliharaan dan optimalisasi sarana pendukung, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih adaptif, transparan, dan responsif.

Saran

Pengembangan Teori Tata Kelola Pemerintahan

Penelitian ini menyarankan agar teori tata kelola pemerintahan lebih dikembangkan sesuai konteks sosial, budaya, dan kapasitas birokrasi di negara berkembang. Prinsip good governance perlu diadaptasi menjadi context-based governance yang menyesuaikan dengan realitas pemerintahan di tingkat kelurahan seperti di Kelurahan Tiroang, sehingga teori yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif.

Penguatan Kajian Akademik Administrasi Publik dan Manajemen Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan studi administrasi publik, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui perbandingan antar-daerah serta menyoroti isu aktual seperti digitalisasi pelayanan publik, inovasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat untuk memperkaya literatur akademik serta mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih efektif dan adaptif..

REFERENCES

Abdul kadir, J. (2020). Desain Reformasi Birokrasi Melalui Role Model Pelayanan Publik Berbasis Smart pada Pemerintahan Kota Bima. 2, 1–23.

akbar, M. I. (2021). Peran Lurah Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.

Akhmaddhian, S. (2016). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 464–478. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.120

Akmal, A. N., Gumilar, G. G., Panji, M., & Santoso, T. (2023). Peran Lurah Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi (Studi Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(1), 4521–4530. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Arisaputra, M. I. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria di Indonesia. Yuridika, 28(2), 188–216.

Asnar, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda. Gulawentah:Jurnal Studi Sosial, 1(2), 121. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v1i2.1035

Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2), 196–210.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya. 2(01), 167–186.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petukangan Utara. 167–186.

Dema, H., Rusdi, A. F., Yasin, A., Hamid, H., & Abriyanti, N. (2021). Transformational Leadership in Creating Good District Government. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 717(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012032

Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. S. (2020). Wawancara.

Fadiah Salsabila, W. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pengajuan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1), 163–174. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.514

Fahlevvi, M. R., & Mendrofa, C. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Implementasi Sistem CRM di Kelurahan Kalisari. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 8(3), 81–90. https://doi.org/10.9963/53kbh596

Gampu, N. N., Tulusan, F., & Mambo, R. (2024). Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 33–44. https://doi.org/10.35797/jap.v10i1.54673

Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 8(2), 65–84. https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293

Iwan Mamminanga, Yusran Yusuf, & Sofyan Marzuki. (2025). Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 37–42. https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.92

Khaidir Ali, Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. 14, 564–584.

Luthfiyah, M. F. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. November, 26.

Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(4), 150–155. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75

Muhammad Nur Hidayat, A., Ramadhan, A., & Na'im Al Jum'ah, M. (2024). BIMTEK FTI: Digital Village Governance. Mekongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 15–20. https://doi.org/10.69616/mekongga.v1i1.173

Nasution, R. halizah, Nurbaiti, & Syafina, L. (2024). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan). Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2(4), 65–78. https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/875

Panggabean, C., & Meilani, N. L. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru Dalam Genggaman Dalam Tinjauan Digital Era Governance). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 721–728. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.622

Prabandani. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis Web Pada Kantor Kelurahan Kasunyatan Menggunakan Framework Larave. 8(1), 46–55.

Prasetyo, E., M. Mazya, T., & Nurimani, N. (2023). Penerapan Model Tata Kelola Digital Pada Pelayanan Publik Daring. Jurnal Governansi, 9(2), 81–94. https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.7448

Prayudha, A. B., Kolopaking, L. M., & Sjaf, S. (2022). Farmer community participation in village building planning in Cikarawang Village, Bogor Regency. Jurnal Sosiologi Dialektika, 17(2), 183–194. https://doi.org/10.20473/jsd.v17i2.2022.183-194

Queen Agave. (2020). Teknik Dokumentasi dan Pelaporan dalam Tataran Klinik.

Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Terhadap Perwujudan Good Governance. Akmen Jurnal Ilmiah, 15(3), 476–496. https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen

Razak, M. R. R., Sailan, M., Arismunandar, A., Jafar, L., & Rifdan, R. (2022). The Application Of Good Governance Principles For Performance Improvement Of Uluale Sub-District Office Apparatuses. Jurnal Pembangunan Masyarakat Di Asia 5.

Said, S., S, Z., Febrianti, D., & Mardhatillah. (2020). Kompetensi Penyuluhan Petugas Promosi Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Kesehatan Pertiwi, 2(2), 155–156.

Saidiman, Sandi Lubis, Muhammad Rais Rahmat Razak, & Ahmad Mustanir. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Prosiding Konferensi Nasional Ke-9 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA), 2(3), 525–540.

Sari, D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB, September 2013, 43.

Selatan, K. S., Units, N., & Subdistrict, S. S. (2025). Community Participation In The Pro-Bebaya Program In. 4(2), 394–401.

Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 188–201.

Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). Journal Social Society, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338

Tambun, S., Sitorus, R. R., Putra, R. R., & Julito, K. A. (2023). Pemanfaatan aplikasi NVivo 12 Plus untuk riset kualitatif di bidang akuntansi. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6(2), 359–372. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19401

Telenggen. (2019). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Eksekutif, 3(3).

Teriraun, C., Permana, D., & Nuradhawati, R. (2025). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Jurnal Prinsip Volume, 1(2), 2025. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip

Tiari Rahma Fani, & Yudi Ferdiana Permana. (2024). Pengaruh Beban Kerja Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kelurahan Cigugur Tengah. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(4), 2179–2185. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2557

Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Inter-Governmental Coordination and the Effectiveness of Welfare Policies. Sibatik Journal, 4(7), 1323–1333. https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

Zulkenedi, Z., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Administratif Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 4326–4333. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12595